

IJ-REDD+ Policy Brief

Series #1

Operationalizing “The Role of Conservation” of REDD+ in Indonesia : Challenges addressed by IJ-REDD+

Latar Belakang

Sejak konferensi COP13 UNFCCC di Bali tahun 2017, berbagai kebijakan dan proyek REDD+ telah diimplementasikan di dunia. Meskipun demikian, “the role of conservation”, yang merupakan satu dari lima kegiatan REDD+, belum ditangani secara memadai. Di Indonesia, proyek REDD+ dalam konteks konservasi telah diterapkan di Taman Nasional Meru Betiri serta Taman Nasional Sebangau, Akan tetapi, mekanisme operasionalisasi konsep “peran konservasi” tidak diuraikan lebih lanjut di dalam kedua proyek tersebut.

Sementara itu, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi, Kementerian LHK, telah menyiapkan aturan baru tentang Pemanfaatan Jasa Karbon Hutan yang mengembangkan sebuah kerangka aturan mengenai manfaat karbon hutan dan non-karbon hutan di hutan konservasi, dan penerapan peraturan baru ini akan menjadi kesempatan nyata untuk mengoperasionalkan konsep “the role conservation”. IJ-REDD+ sebagaimana mestinya mendukung proses ini melalui kedua konsep kerja, baik operasionalisasi maupun uji coba di tingkat lapangan pada Taman Nasional Gunung Palung dan hutan konservasi lainnya.

Ruang Lingkup IJ-REDD+

IJ-REDD+ dimulai pada Juni 2013 sebagai proyek tiga tahun (fase 1), dan telah disetujui perpanjangan waktu selama dua tahun yaitu dari Juni 2016 hingga Juni 2018 (tahap 2). Tujuan IJ-REDD+ adalah konsisten sepanjang periode proyek, yaitu “mekanisme pelaksanaan REDD+ dikembangkan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,” dengan output inti adalah pengembangan model REDD+ untuk taman nasional (bentang alam¹). Meskipun ide output inti ini pada dasarnya sama baik dalam fase 1 maupun fase 2, namun pendekatannya berbeda.

Pada fase 1, pendekatan proyek dalam pengembangan Project Design Document (PDD) untuk daerah sasaran (Taman Nasional Gunung Palung dan bentang alamnya) merupakan pekerjaan utama dan diharapkan PDD tersebut harus diakui oleh standar REDD+ Internasional seperti Voluntary Carbon Standard (VCS) dan kredit karbon yang dikeluarkan dan dijual ke luar. Namun, setelah penyerahan Forest Reference Emission Level (FREL) oleh Pemerintah Indonesia untuk UNFCCC pada akhir tahun 2015, IJ-REDD+ mengubah pendekatannya dari proyek ke yurisdiksi; yaitu dengan pendekatan provinsi.

Background

Since the 2007 Bali United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) conference, various REDD+ policies and projects have been implemented throughout the world. Despite this, “the role of conservation”, which is one of the five REDD+ activities, has not been sufficiently addressed. In Indonesia, REDD+ projects in the conservation context were implemented in Meru Betiri National Park and Sebangau National Park. However, the mechanism of operationalizing the concept of “the role of conservation” was not elaborated upon.

In the meantime, Directorate for Environmental Service of Conservation Forests (PJLHK) of Ministry of Environment and Forestry has been preparing a new regulation on Forest Carbon Services. This regulation will develop a regulatory framework for recognizing both forest carbon and non-carbon benefits in conservation forests. The execution of the new regulation will be an important opportunity to operationalize the concept of “the role of conservation”. IJ-REDD+ duly supports this process through both the conceptual work of its operationalization and the experimentation in the field at Gunung Palung National Park and other conservation forests.

Project Scope of IJ-REDD+

IJ-REDD+ started in June 2013 as a three-year project (Phase 1). The extension of IJ-REDD+ was approved in June 2016, resulting in the project being extended through June 2018 (Phase 2). The Project Purpose of IJ-REDD+ is consistent throughout the project period; which is “REDD+ implementation mechanism is developed in West and Central Kalimantan”. The core output is ‘the development of a REDD+ model for the national park (landscape¹)’. While the idea of the core output is basically the same in Phase 1 and 2, its approach is different.

Under Phase 1, it was the project approach, in which the development of the Project Design Document (PDD) for the target area (i.e. Gunung Palung National Park landscape) was the major work. It was expected that the PDD was to be recognized by an international REDD+ standard (e.g. Voluntary Carbon Standard) and carbon credits were issued and sold out. However, upon the submission of the Forest Reference Emission Levels (FREL) by the Government of Indonesia to UNFCCC in late 2015, IJ-REDD+ changed its approach from project to jurisdictional; namely, to the provincial approach.

¹ Pada awalnya, areal sasaran adalah “taman nasional” tetapi berubah menjadi “lanskap taman nasional” pada revisi jangka menengah yang dilakukan pada bulan Maret 2015. Implikasinya adalah bahwa daerah target tidak hanya mencakup wilayah taman nasional tetapi juga wilayah sekitarnya.

¹ Initially, the target area was “national park”. It was changed to the “national park landscape” during the mid-term review conducted in March of 2015. The implication is that the target area covers the national park area and its surrounding areas.

Perbedaan penting antara pendekatan proyek fase 1 dan fase 2 adalah bahwa saat perhitungan emisi GRK dibuat secara independen dalam pendekatan proyek, perhitungannya konsisten di taman nasional, provinsi dan tingkat nasional di bawah pendekatan yurisdiksi.

Pelaksanaan “the role of conservation” REDD+

IJ-REDD+ menyadari output “pengembangan model IJ REDD+ di Taman Nasional (bentang alam)” sejalan dengan pelaksanaan konsep “the role of conservation” dari REDD+. Sebelumnya, REDD+ berfokus pada upaya untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan sehingga pertimbangan mekanisme penghargaan terbatas pada jumlah pengurangan emisi terhadap FREL. Ini mengindikasikan upaya-upaya konservasi yang telah sukses pada waktu lalu (contoh : keberadaan areal berhutan tanpa deforestasi dan degradasi yang berlangsung dalam beberapa tahun lalu atau lebih) berada di luar cakupan REDD+. Oleh karena itu, salah satu tantangan masa depan untuk REDD+ adalah memperoleh metode pragmatis bagaimana upaya-upaya sukses di bidang konservasi yang telah dilakukan dapat dinilai dalam mekanisme REDD+ dan bagaimana hal itu bisa dihargai.

Salah satu rekomendasi untuk mengatasi tantangan ini adalah konsep “premium” atau “adjustment”. Contoh, sebuah taman nasional yang tercatat tidak ada degradasi pada dekade lalu memiliki nol emisi CO₂ sebagai baseline atau FREL. Karenanya, keberhasilan dari upaya konservasi tersebut tidak menghasilkan nilai REDD+. Namun, jika nilai tertentu “premium” atau ‘adjustment’ disiapkan, contohnya, 5 tCO₂-e/hektar/tahun sebagai baseline, maka perhitungan jumlah setara terhadap pengurangan emisi ini melalui upaya-upaya sukses konservasi dapat dihargai. Penghitungan “premium” atau “adjustment” ini dapat dikaitkan dengan kekayaan keranekaragaman hayati dan manfaat-manfaat non-karbon lainnya.

Dalam pelaksanaan konsep “the role of conservation” REDD+ tersebut, IJ REDD+ akan mendukung PJLHK dalam menyiapkan peraturan baru tentang manfaat karbon dan non-karbon hutan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membentuk kelompok kerja;
2. Mengkaji konsep-konsep dan metodologi yang relevan dalam menghitung nilai-nilai non-karbon hutan;
3. Mengembangkan sebuah hipotesis kerja untuk memahami nilai-nilai karbon dan non karbon;
4. Menguji hipotesis kerja di beberapa taman nasional; dan
5. Menyusun laporan.

Hasil dari proses di atas diharapkan tidak hanya diterapkan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya, tetapi juga pada hutan-hutan yang dikelola untuk kepentingan konservasi.

Kesimpulan

IJ-REDD+ menguji pelaksanaan konsep “the role conservation” REDD+ berdasarkan peraturan baru tentang jasa karbon hutan di Indonesia. Hal ini untuk mengukur manfaat non-karbon dari ekosistem hutan melalui cara tertentu, belum tentu secara ekonomi, dan hubungan dengan karbon hutan sehingga hutan dapat dinilai, baik dalam hal manfaat karbon dan non-karbon dalam konteks “the role of conservation” REDD+. Konsep “premium” atau “adjustment” tersebut diperkenalkan dalam menghargai nilai-nilai hutan dan uji cobanya akan dilakukan di Taman Nasional Gunung Palung dan hutan-hutan konservasi. Hasil dari pekerjaan ini tidak hanya diterapkan di hutan konservasi, namun juga pada hutan-hutan lainnya yang dikelola untuk kepentingan konservasi.

The critical difference between the project approach (Phase 1) and the jurisdictional or provincial approach (Phase 2) is that while the GHG emissions calculation is made independently under the project approach, the calculation is consistent at the national park, province and national levels under the jurisdictional approach.

Operationalizing “the role of conservation” of REDD+

IJ-REDD+ recognizes the output of ‘the development of a REDD+ model in national park (landscape)’ as being equivalent to operationalizing the concept of “the role of conservation” of REDD+. In the past, REDD+ has only focused on efforts for reducing deforestation and forest degradation, such that the consideration of a reward mechanism was limited to the amount of emissions reductions against the FREL. This indicates that conservation efforts that have already been successful in the past (i.e. forested areas where no deforestation and forest degradation have occurred in the past several years or more) are out of the REDD+ scope. Hence, one future challenge for REDD+ is to identify pragmatic methods required to measure how on-going successful efforts of conservation can be valued in a REDD+ mechanism and how such conservation efforts could be rewarded.

One recommendation to address this challenge is the concept of the ‘premium’ or the ‘adjustment’. For example, a national park that records no deforestation and forest degradation in the past decade holds zero CO₂ emissions as a baseline or FREL. Hence, successful conservation efforts produce no REDD+ values. However, if a certain ‘premium’ or ‘adjustment’ is provided (e.g., 5 t CO₂ -e / hectare / year as a baseline), then, successful efforts calculate this amount that is equivalent to the emission reductions so that it is rewarded. The calculation of a ‘premium’ or ‘adjustment’ can be linked to the richness of the biodiversity and other non-carbon benefits.

In operationalizing the concept of “the role of conservation” of the REDD+, IJ-REDD+ will support PJLHK to prepare for the execution of the new regulation on forest carbon and non-carbon benefits by applying the following steps :

1. *Set up a working group;*
2. *Review relevant concepts and methods on the quantification of forest non-carbon values;*
3. *Develop a working hypothesis to understand the carbon and non-carbon values;*
4. *Test the working hypothesis at several national parks; and*
5. *Compile the report.*

The results are applied to National Parks, other Conservation Forests and any forests that are managed for the conservation purpose.

Conclusion

IJ-REDD+ examines the operationalization of the concept of “the role of conservation” of REDD+ under the new regulation on Forest Carbon Services. The work of the operationalization is to quantify the non-carbon benefits of forest ecosystems in a certain manner, not necessarily in economic terms, and link this information with forest carbon. In this way, the forest is valued in terms of both carbon and non-carbon benefits in the context of “the role of conservation” of REDD+. The concept of a ‘premium’ or ‘adjustment’ is introduced in rewarding these forest values. Their experimentation will be made in Gunung Palung National Park and other conservation forests. The results of this work will be applied not only in National Parks but also in any forests that are managed for the conservation purpose.